

## ABSTRAK

PT. Inti (Persero) merupakan sebuah entitas usaha yang memiliki sejumlah karyawan diwajibkan untuk memotong PPh Pasal 21 terhadap karyawannya. Berdasarkan Undang-undang Perpajakan RI No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, PPh Pasal 21 merupakan pajak yang ditanggung karyawan, namun demikian perusahaan diberikan beberapa alternatif kebijakan untuk menghitung PPh Pasal 21 terutang, yaitu :

1. Kebijakan PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan/pemberi kerja
2. Kebijakan PPh Pasal 21 ditanggung pegawai.
3. Kebijakan PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak.
4. Kebijakan PPh Pasal 21 *digross-up*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemilihan alternatif kebijakan PPh Pasal 21 terhadap penghematan PPh Badan. PT. Inti (Persero).

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis yaitu suatu metode penelitian yang memberikan gambaran, memaparkan, menuliskan dan melaporkan keadaan perusahaan berdasarkan fakta yang ada untuk kemudian diolah menjadi data yang selanjutnya dianalisis sehingga diperoleh suatu kesimpulan.

Penelitian ini dilakukan pada PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI), sebuah perusahaan BUMN yang berlokasi pada Jalan Moch. Toha No.77 Bandung (40253). Perusahaan ini bergerak dalam bidang *engineering solution* yang menyediakan infrastruktur telekomunikasi nasional.

Data-data dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data penelitian lapangan yang terdiri dari wawancara, observasi dan dokumentasi serta didukung oleh penelitian kepustakaan. PT. Inti (Persero) selama ini menerapkan kebijakan PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian, apabila perusahaan menerapkan alternatif kebijakan PPh Pasal 21 yang ditanggung pegawai, diberikan dalam bentuk tunjangan pajak oleh perusahaan dan di *gross up*, maka akan terdapat perbedaan dalam hal pajak penghasilan terutang, *take home pay*, tingkat laba perusahaan serta selisih antara biaya fiskal dan biaya komersial yang harus ditanggung oleh perusahaan. Jumlah pajak penghasilan terutang untuk kebijakan PPh Pasal 21 di *gross up* lebih menguntungkan perusahaan karena perusahaan membayar pajaknya lebih kecil, sedangkan untuk jumlah selisih antara biaya fiskal dan biaya komersial yang harus ditanggung oleh perusahaan juga lebih menguntungkan karena perusahaan menanggung selisih yang lebih kecil.

Penulis menyimpulkan bahwa penerapan kebijakan PPh Pasal 21 di *gross up* lebih menguntungkan daripada penerapan kebijakan PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan/pemeberi kerja, ditanggung pegawai, diberikan dalam bentuk tunjangan pajak oleh perusahaan, khususnya dalam hal pajak penghasilan terutang dan jumlah gaji yang dibawa pulang oleh pegawai (*take home pay*). Penulis menyarankan agar PT. INTI (Persero) menerapkan kebijakan PPh Pasal 21 di *gross up*.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	Iv
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	v
<b>DAFTAR ISI.....</b>	ix
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	9
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Kegunaan Penelitian.....	10
1.5 Rerangka Pemikiran .....	11
1.6 Metode Penelitian.....	13
1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Pajak.....	16
2.1.1 Definisi Pajak.....	16
2.1.2 Ciri-ciri Perpajakan.....	
2.1.3 Fungsi Perpajakan .....	18

2.1.4 Prinsip dan Asas-asas Perpajakan .....	19
2.1.5 Pengelompokan Perpajakan.....	20
2.1.6 Tata Cara Pemungutan Pajak .....	23
2.1.7 Tarif Pajak .....	24
2.1.8 Timbul dan Hapusnya Utang Pajak .....	26
2.2 Pajak Penghasilan.....	28
2.2.1 Definisi Pajak Penghasilan .....	29
2.2.2 Subyek Pajak Penghasilan .....	29
2.2.3 Objek Pajak Penghasilan.....	29
2.2.4 Yang Tidak Termasuk Dalam Subjek.....	31
2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	32
2.3.1 Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	33
2.3.2 Wajib Pajak PPh Pasal 21 .....	33
2.3.3 Pengecualian Wajib Pajak PPh Pasal 21 .....	34
2.3.4 Penghasilan Yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	35
2.3.5 Pengecualian dari Pengenaan PPh Pasal 21.....	36
2.3.6 Objek PPh Pasal 21 .....	37
2.3.7 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	39
2.3.8 Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak .....	41
2.3.9 Hak dan Kewajiban Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	43
2.4 Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21.....	48

2.4.1 Penghasilan Tidak Kena Pajak PPh Pasal 21.....	49
2.4.2 Tarif Pajak PPh Pasal 21.....	49
2.4.3 Perencanaan Pajak.....	50
2.4.3.1 Definisi Perencanaan Pajak.....	51
2.4.3.2 Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan Pajak.....	51
2.4.4 Pemilihan Alternatif Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	52
2.4.5 Rumus Perhitungan Metode <i>Groos Up</i> .....	56
2.4.6 Perhitungan PPh pasal 21 berdasarkan pemilihan alternatif .....	56
2.4.6.1 Contoh PPh pasal 21 Terutang .....	57
2.4.6.2 Contoh Hasil Perhitungan PPh pasal 21 berdasarkan pemilihan alternatif .....	57
2.4.6.3 Ikhtisar Perhitungan PPh pasal 21 berdasarkan pemilihan alternatif .....	59
<b>BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN</b>	<b>63</b>
3.1 Obyek Penelitian .....	
3.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan .....	65
3.1.2 Struktur Organisasi .....	65
3.1.3 Uraian Tugas.....	71
3.1.4 Aktivitas Perusahaan.....	72
3.2 Metode Penelitian.....	87
3.2.1 Definisi Penelitian.....	90

3.2.2 Metode Yang Digunakan .....	90
3.2.3 Jenis dan Sumber Data.....	90
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	91
4.1 Analisis Hasil Pengumpulan Data.....	
4.2 Wajib Pajak, Cara Pembayaran dan Penerapan penghitungan PPh Pasal 21 Pada PT. INTI (Persero).....	95
4.3 Beberapa Alternatif Penghitungan PPh Pasal 21 .....	95
4.3.1 Data Gaji Karyawan dan Cara Penghitungan PPh Pasal 21 Pada PT. INTI (Persero).....	96
4.3.2 Penghitungan PPh Pasal 21, dengan Alternatif Pajak Ditanggung Pemberi Kerja.....	97
4.3.3 Penghitungan PPh Pasal 21, dengan Alternatif Pajak Ditanggung karyawan .....	106
4.3.4 Penghitungan PPh Pasal 21, dengan Alternatif Pajak Diberikan tunjangan pajak .....	109
4.3.5 Penghitungan PPh Pasal 21, dengan Alternatif Diberikan Tunjangan Pajak dengan Cara di <i>Gross up</i> .....	112
4.4 Perbandingan <i>Take Home Pay</i> Dengan Pemilihan Alternatif Pajak .....	112
4.5 Ikhtisar Penghitungan PPh Pasal 21 Berdasarkan Pemilihan Alternatif...	119
4.6 Pengaruh Pemilihan Alternatif Kebijakan PPh Pasal 21 Terhadap PPh Badan.....	121

4.6.1 Laporan Laba Rugi Menggunakan Kebijakan PPh Yang Ditanggung Perusahaan.....	123
4.6.2 Laporan Laba Rugi Menggunakan Kebijakan PPh Yang Ditanggung Karyawan .....	124
4.6.3 Laporan Laba Rugi Menggunakan Kebijakan PPh Yang Diberikan Dalam Bentuk Tunjangan Pajak .....	125
4.6.4 Laporan Laba Rugi Menggunakan Kebijakan PPh Yang Diberikan Dalam Bentuk Tunjangan Pajak Dengan Cara <i>Gross up</i> .....	126
4.6.5 Pengaruh Pemilihan Alternatif Kebijakan PPh Pasal 21 Terhadap PPh Badan .....	127
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b>	128
5.1 Simpulan.....	
5.2 Saran.....	129
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	131
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	132

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1 Tarif Pajak Progresif Wajib Pajak Orang Pribadi.....	27
Tabel 2.2 Tarif Progresif Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).....	27
Tabel 2.3 Penghasilan Tidak Kena Pajak Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/KMK.03/2005Rumus Perhitungan <i>Gross</i> <i>up</i> .....	50
Tabel 2.4 Tarif Pajak Orang Pribadi.....	51
Tabel 2.5 Formula Umum Penghitungan Pajak Penghasilan.....	53
Tabel 2.6 Rumus Perhitungan <i>Gross up</i> .....	56
Tabel 2.7 Contoh Kasus PPh Pasal 21.....	58
Tabel 2.8 Contoh Perhitungan PPh Pasal 21.....	59
Tabel 2.9 Contoh PTKP dan PPh Pasal 21.....	60
Tabel 2.10 Contoh Pemilihan Alternatif Pajak.....	61
Tabel 2.11 Cara Lain Menghitung <i>Take Home Pay</i> .....	94
Tabel 2.12 Ikhtisar Penghitungan Alternatif.....	97
Tabel 4.1 Penghitungan PPh Pasal 21, Pajak Ditanggung Pemberi kerja.....	108
Tabel 4.2 Penghitungan PPh Pasal 21, Pajak Ditanggung Pegawai.....	111

Tabel 4.3	Penghitungan PPh Pasal 21, Pajak Diberikan Dalam Bentuk Tunjangan Pajak .....	114
Tabel 4.4	Penghitungan PPh Pasal 21, Pajak Diberikan Dalam Bentuk Tunjangan Pajak Dengan Cara di <i>Gross up</i> .....	117
Tabel 4.5	PTKP dan PPh Pasal 21.....	118
Tabel 4.6	Perbandingan <i>Take Home Pay</i> .....	118
Tabel 4.7	Cara lain menghitung <i>Take Home Pay</i> .....	120
Tabel 4.8	Ikhtisar Penghitungan Alternatif.....	121
Tabel 4.9	Laporan Laba Rugi Menggunakan PPh Yang Ditanggung Perusahaan.....	124
Tabel 4.10	Laporan Laba Rugi Menggunakan PPh Yang Ditanggung Pegawai.	125
Tabel 4.11	Laporan Laba Rugi Menggunakan PPh Yang Diberikan Dalam Bentuk Tunjangan Pajak.....	126
Tabel 4.12	Laporan Laba Rugi Menggunakan PPh Yang Diiberikan Dalam Bentuk Tunjangan Pajak Dengan Cara di <i>Gross up</i> .....	127
Tabel 4.13	Perbandingan Alternatif Kebijakan Terhadap PPh Badan.....	128



